



Judul	: Kasus hukum membuat kredibilitas BPK tergerus
Tanggal	: Rabu, 15 November 2023
Surat Kabar	: Media Indonesia
Halaman	: 2

Kasus Hukum Membuat Kredibilitas BPK Tergerus

BERULANGNYA kasus hukum yang menjerat anggota Badan Periksa Keuangan (BPK) dinilai bakal menggerus kepercayaan masyarakat. Dampaknya dapat meluas kepada menurunnya keyakinan masyarakat terhadap kredibilitas pengelolaan keuangan negara yang dilakukan pemerintah dan lembaga negara.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Mohammad Faisal terkait dengan berulangnya kasus hukum yang menimpak auditor negara.

"Dari sudut pandang ekonomi, ini memengaruhi bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan

negara karena BPK punya tugas dan tanggung jawab dalam memeriksa pengelolaan keuangan negara oleh lembaga lembaga negara, baik itu di pemerintah pusat, daerah, maupun BUMN," ujarnya, kemarin.

Banyak kasus hukum yang melibatkan auditor negara itu terkait dengan tawar menawar hasil pemeriksaan yang dilakukan. Hal itu berpotensi memunculkan persepsi terkait dengan kredibilitas hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK. "Karena itu, penertiban pada institusi

strategis seperti BPK sangat penting karena berefek terhadap *trust* masyarakat. Perlu juga diperhatikan bahwa kasus

yang dikehilkhan terkait dengan BPK ini tidak hanya sekali, ada beberapa kali," kata Faisal.

Senada, analis utama ekonomi politik dari Laboratorium Indonesia 2045 (Lab 45) Reyhan Noor menyatakan penting bagi BPK untuk berbenah, utamanya terkait integritas dalam menjalankan tugas dan fungsi. "Hal yang paling utama adalah memastikan proses rekrutmen anggota BPK memperhitungkan potensi konflik kepentingan dari calon-calon yang ada," kata Reyhan.

Setidaknya dalam dua pekan terakhir BPK dirundung persoalan hukum. Pada Jumat (3/11), anggota III BPK Achsa-

nul Qosasi ditetapkan penyidik Kejaksaan Agung sebagai tersangka dalam dugaan korupsi proyek pembangunan BTS 4G Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kemudian pada Senin (13/11), KPK menyegel ruang kerja anggota IV BPK Pius Lustrianang terkait dengan penetapan enam tersangka hasil OTT di Sorong, Papua Barat Daya. Menurut KPK, Pius diditeksi sedang berada di Korea Selatan.

Soal kasus-kasus itu, BPK telah memohon maaf. "BPK sangat menyesalkan peristiwa yang terjadi dan pada kesempatan ini BPK minta maaf kepada masyarakat. Secara internal, BPK tidak menoleransi dan memastikan akan mewujudkan tegas oknum BPK yang terbukti melanggar kode etik dan disiplin pegawai," ungkap siaran pers BPK. (Mir/Can/X-6)